

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR PERUSAHAAN

Henny Ekawati¹

Abstract

Business practice lately had caused many damages to the society around the corporates. They were directly effected by this practice in a bad way. They still live poorly while the corporates were getting richer by absorbing as much as they could from the resources. The policy by the government is to make the corporates giving back what they had taken to the society around them. They should arrange programs namely Corporate Social Responsibilites to empower the society. But in the implementation, some problems ocured, such as the inconsistency of the program and the top-down program which did not involved society and related institutions. Later the program should be studied more to at the end empower the society and minimalized conflicts.

Keywords: corporate social responsibilities, empowerment, corporates

Pendahuluan

Secara teoretis pembangunan industri sebenarnya memiliki banyak manfaat positif, antara lain menyerap tenaga kerja, meningkatkan produktivitas ekonomi, serta menjadi aset pembangunan nasional dan daerah. Namun, pada kenyataannya selama beberapa dekade ini praktik bisnis berbagai perusahaan besar di Indonesia cenderung memarginalkan masyarakat sekitar. Masyarakat yang hidup di sekitar perusahaan yang pada mulanya miskin semakin termarginalkan karena kehadiran berbagai jenis perusahaan tersebut. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan secara baik terhadap masyarakat.

Perusahaan pada masa lalu lebih banyak bergerak dalam konteks mengutamakan

keuntungan bagi perusahaan sendiri dan lebih banyak diwajibkan melakukan pemulihan terhadap lingkungan. Hal ini berkaitan dengan keadaan daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial yang diberikan oleh perusahaan terhadap komunitas yang ada di sekitarnya lebih banyak bersifat karitatif.

Selain itu, ada kecenderungan pola pemukiman bagi karyawan dan kerabatnya terlepas sama sekali dengan komunitas lokal yang ada. Hal ini kemudian menampakkan kantung-kantung permukiman di dalam permukiman komunitas lokal. Kecenderungan pemisahan pola pemukiman ditunjang pula oleh adanya pola hidup yang berbeda antarkomunitas sehingga memunculkan banyak kecemburuan sosial dari komunitas lokal terhadap komunitas perusahaan. Kecemburuan sosial ini dapat memuncak dan

¹ Staf peneliti pada Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

meletus dalam bentuk konflik manakala terdapat suatu kesalahan pengelolaan dari komunitas perusahaan terhadap lingkungannya yang mengakibatkan kerugian pada komunitas lokal (Rudito, dkk., 2004: 81).

Oleh karena itu, perusahaan kemudian dituntut memberikan kontribusinya dalam kehidupan komunitas lokal sebagai rekanan dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya bahwa perusahaan harus mempunyai kewajiban sosial terhadap komunitas di sekitarnya dan memperlakukan komunitas lainnya sebagai sesuatu yang berdiri sejajar dan saling membutuhkan (Rudito, dkk., 2004: 82).

Di sinilah pentingnya program tanggung jawab sosial perusahaan (dalam istilah aslinya disebut sebagai *CSR/Corporate Social Responsibility*) bagi pemberdayaan masyarakat sekitar yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat tersebut untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat yang masih tertinggal tidak cukup dengan meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan memberikan suntikan modal saja, tetapi juga dengan kerja sama yang erat antara yang kuat dan yang lemah secara berkesinambungan. Pengembangan kegiatan sosial ekonomi rakyat perlu diprioritaskan pada pengembangan kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin di desa-desa tertinggal. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan permodalan yang didukung sepenuhnya dengan kegiatan pelatihan yang terintegrasi mulai dari kegiatan pembentukan modal, penguasaan teknik

produksi, pemasaran hasil, dan pengelolaan surplus usaha (Sumodiningrat, 2000).

Ditinjau dari sisi hukum UU Migas Tahun 2001, program *Community Development* (pengembangan masyarakat) dan reklamasi lingkungan direalisasikan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (untuk selanjutnya disingkat CSR) (Sumarto, *Tempo*, Agustus 2007). Sayangnya, peraturan tersebut belum dapat ditegakkan karena keterbatasan dukungan kelembagaan. Namun demikian, selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini ternyata sekitar 30–40 persen perusahaan di Indonesia sudah menjalankan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat (*Tempo*, April 2007). Munculnya UU PT yang baru disahkan memunculkan sedikit kekhawatiran dari Kadin dan sejumlah asosiasi perusahaan. Semangat UU tersebut adalah sentralisasi pelaksanaan CSR, termasuk mengatur besaran dana yang harus dialokasikan perusahaan, yaitu sekitar tiga hingga empat persen dari keuntungan perusahaan dana tersebut diatur oleh pemerintah. Ketentuan tersebut dapat menjadi *blunder* karena pemerintah belum siap (Sumarto, *Republik*, 25 September 2007).

Tulisan ini akan melihat (1) bagaimana model CSR yang dikembangkan oleh perusahaan A dan perusahaan B serta (2) bagaimana implementasi dan dampak CSR dalam pemberdayaan masyarakat sekitar. Data dalam tulisan ini didasarkan pada penelitian CSR di Provinsi Riau dan Kalimantan Timur oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM bekerja sama dengan UNDP tahun 2004 jauh hari sebelum munculnya UU PT tersebut. Secara khusus data yang digunakan hanya merupakan data yang dikumpulkan di Provinsi Riau sesuai keterlibatan penulis.

Implementasi CSR di Provinsi Riau

Implementasi CSR dalam tulisan ini meliputi dua perusahaan, yaitu perusahaan A dan perusahaan B yang berada di Provinsi Riau. Perusahaan A ini berada di beberapa kabupaten, yaitu di Kota D, Kabupaten K, dan Kabupaten B di Provinsi Riau. Sementara itu, perusahaan B berada di dua kabupaten, yaitu Kabupaten P dan Kabupaten K. Ide pembentukan program CSR antara kedua perusahaan tersebut sedikit berbeda. Perusahaan A sudah beroperasi di wilayah ini puluhan tahun yang lalu. Namun sejak awal berdiri belum ada kegiatan CSR yang dilakukan. Setelah ada tuntutan dari masyarakat sekitar perusahaan mengenai hak-hak mereka, perusahaan kemudian tergugah melakukan CSR. Bagi perusahaan B kesadaran melakukan CSR lebih cepat meskipun tidak bersamaan dengan beroperasinya perusahaan tersebut. Perusahaan ini berdiri tahun 1992, sementara CSR baru mereka lakukan tahun 1995.

Kegiatan CSR dua perusahaan di Provinsi Riau ini memang agak terlambat.

Bentuk kegiatan CSR PTA adalah Program Ekonomi Pertanian. Program ini merupakan program pengembangan pertanian terpadu berbasis komoditas unggulan. Implementasi program berupa penanaman pohon pisang, penanaman cabai, pembuatan keramba ikan dan pelatihan. Sementara itu, kegiatan dilakukan PT B kebanyakan berupa pembangunan sarana fisik.

Keseriusan PT B dalam mengembangkan CSR terlihat dengan menempatkan CSR di bawah departemen tersendiri yang disebut Departemen Program Pemberdayaan Masyarakat Riau (PPMR). Salah satu program unggulan PPMR PT B adalah pengembangan pertanian terpadu berbasis komoditas unggulan. Program tersebut dilakukan di beberapa kecamatan di Kabupaten Pelalawan. Sebagai pelaksana teknis kegiatan ini, PT B menempatkan seorang pelaksana fasilitator/penyuluh pertanian di lapangan PPMR PT B,

Tabel 1
Pelaksanaan Program CSR PT B dan PT A

Kegiatan CSR	PT A	PT B
Manajemen Pelaksanaan	Hanya di bawah <i>Public Affair</i>	Di bawah departemen tersendiri
Jenis Program	Sepuluh tahun lebih setelah berdiri dilakukan CSR setelah ada tuntutan masyarakat	CSR dilaksanakan 3 tahun setelah berdiri
Fasilitator/Petugas Lapangan	Program Fisik Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan	Program Ekonomi Pertanian
Lokasi Program	Tidak ada fasilitator	Ada fasilitator
	Lebih menyebar, baik lingkup desa maupun kabupaten	Lokasi langsung ke desa sekitar perusahaan di beberapa kecamatan

Sumber: Hasil wawancara, 2004.

yaitu seorang sarjana pertanian pada setiap desa binaan mereka.

Kegiatan ini dilakukan di Desa Tambak, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Program ini dilaksanakan di lokasi tersebut karena secara geografis Desa Tambak berdekatan dengan Hutan Tanaman Rakyat yang dikelola oleh PT B. Sebelum melaksanakan CSR di desa ini, CSR sudah dilakukan di desa lain, kecamatan lain. Mengetahui adanya program CSR dari PT B, masyarakat Desa Tambak juga menginginkan program CSR untuk wilayah mereka apalagi masyarakat mengetahui program CSR PT B, antara lain, bergerak di bidang pertanian. Untuk itu, masyarakat segera membuat proposal yang kemudian diajukan ke PT B. Ternyata permintaan tersebut disambut baik oleh PT B dengan menempatkan petugas lapangan untuk mendampingi petani mengakomodasi segala keperluan petani dalam pelaksanaan Program Pertanian Terpadu.

Kegiatan Program Pertanian Terpadu yang sudah dilakukan, antara lain, adalah pemberian pelatihan, penanaman pisang, dan peternakan. Program penanaman pisang berjalan lancar hingga panen pertama, bahkan wilayah ini pernah terkenal dengan adanya panen raya pisang. Selain penanaman pisang, juga dilaksanakan program penanaman cabai, petai, dan pembuatan keramba. Penyuluhan di bidang pertanian juga diadakan oleh PT B lebih ditekankan pada pelatihan di bidang pertanian.

Pengembangan program CSR PT A belum seperti PT B dengan membentuk suatu departemen tersendiri, tetapi masih berada di bawah manajer *Public Affair*. Pelaksanaan program CSR yang baru dilakukan oleh PT A

ini sangat terlambat, hampir sepuluh tahun setelah PT A beroperasi di provinsi ini. Program CSR perusahaan ini dilakukan di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Riau di sekitar lokasi tempat perusahaan berada.

Pelaksanaan *community development* PT A mempunyai sasaran utama kegiatan yang meliputi *pertama*, pendidikan dan peningkatan SDM; *kedua*, kesehatan masyarakat; dan *ketiga*, peningkatan pendapatan serta proyek-proyek khusus. Dalam kegiatannya CSR PT A tidak menempatkan fasilitator pada setiap kegiatan mereka. Pada kenyataannya kebanyakan program yang dijalankan adalah di bidang pendidikan.

Para petani di beberapa lokasi merasa perencanaan kegiatan CSR perusahaan B masih bersifat dari atas ke bawah karena meskipun masyarakat diminta membuat proposal, pilihan kegiatan masih bersifat dari atas ke bawah. Hampir semua penduduk memang memperoleh program ini. Isu yang muncul adalah program kewajiban menanam pohon pisang hanya sebagai syarat untuk memperoleh bantuan sapi secara berkelompok. Bagi petani tertentu menanam bantuan bibit pisang merupakan kesadaran sendiri, tetapi tidak bagi petani yang lain. Beberapa petani yang lain bersedia menanam pisang hanya sebagai syarat agar mereka mendapatkan bantuan ternak sapi.

Kegiatan penanaman pisang dan panen pertama berjalan lancar, tetapi pada panen kedua masyarakat tidak dapat memasarkan hasil pertanian mereka. Banyak warga melakukan protes karena banyak buah pisang yang akhirnya dibiarkan membusuk karena petani tidak dapat memasarkan hasilnya. Petani tidak dapat menanggung mahalannya

biaya transportasi yang harus mereka keluarkan untuk menjual pisang mereka ke kota. Selain itu, para petani mengaku tidak mempunyai jaringan pemasaran hasil pertanian yang memadai. Pada saat itu terjadi sedikit konflik dengan masyarakat, tetapi tidak sampai terjadi konflik fisik.

Selain program penanaman pisang, juga terdapat program penanaman cabai, petai, dan pembuatan keramba. Pada program ini perencanaannya lebih demokratis (dari bawah ke atas) dibandingkan dengan program penanaman pisang. Perencanaan program ini dimulai dari beberapa petani yang membuat kelompok kemudian berdiskusi bersama untuk membuat program yang diwujudkan dalam bentuk proposal yang diajukan kepada PT B melalui kepala desa. Pelaksanaan program ini relatif berjalan karena masyarakat dapat memasarkan sendiri hasil pertanian mereka

atau beberapa petani tertentu dikonsumsi sendiri.

Demikian pula pada program penanaman ikan. Selain program penanaman, juga ada program pelatihan bagi para petani. Program pelatihan dilakukan pada beberapa petani di tingkat desa. Usulan materi program pelatihan bagi para petani dilakukan secara dari atas ke bawah, bukan atas inisiatif dari para petani. Pada pemberian penyuluhan hanya dirumuskan oleh fasilitator PT B di tingkat kecamatan.

Keberhasilan komunikasi ini akan memunculkan persepsi yang positif dari masyarakat penerima. Persepsi yang baik dari masyarakat terhadap keberadaan program akan melahirkan partisipasi aktif masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat akan membantu keberhasilan program sesuai

Tabel 2
Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Program CSR

Jenis Program	Persepsi	Partisipasi	Keberlanjutan	Konflik
A. PT B				
- Pertanian pisang	Dari atas ke bawah ada fasilitator	Baik	Kurang	Ada
- Pertanian cabai	Dari bawah ke atas ada fasilitator	Baik	Baik	Tidak
- Keramba ikan	Dari bawah ke atas ada fasilitator	Baik	Baik	Tidak
- Pelatihan	Dari atas ke bawah ada fasilitator	Baik	Baik	Tidak
B. PT A				
- Fisik	Dari bawah ke atas tidak ada fasilitator	Baik	Kurang	Tidak
- Ekonomi (industri kecil)	Dari atas ke bawah tidak ada fasilitator	Kurang	Kurang	Tidak
- Kesehatan dan lingkungan	Dari atas ke bawah tidak ada fasilitator	Kurang	Kurang	Ada

Sumber: Wawancara Mendalam, 2004.

dengan kemampuan mereka. Partisipasi aktif akan segera terwujud jika program dilakukan dengan cara dari bawah ke atas menyerap aspirasi dari masyarakat penerima bukan berasal dari perusahaan. Partisipasi masyarakat selama ini terhadap program CSR PT B cukup bagus meskipun masih ada program yang bersifat dari atas ke bawah. Dalam program penanaman pisang partisipasi masyarakat sangat bagus, hampir semua warga menanam pohon pisang. Meskipun pada akhirnya ada kelemahan program, yaitu tidak adanya pemasaran yang bagus atau bantuan perusahaan pada petani dalam pemasaran hasil panen tersebut.

Sementara itu, program nonfisik CSR PT A pada umumnya bersifat dari atas ke bawah, perencanaan secara murni tidak berasal dari usulan masyarakat. Kasus yang belum lama ini terjadi adalah bantuan pembinaan wirausaha di Desa Tanjung Sawit. Desa Tanjung Sawit merupakan desa yang wilayahnya dilalui oleh pipa PT A. Keberadaan pipa PT A dirasakan cukup mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar pipa. Dampak ekonomi yang dirasakan pemilik tanah tersebut adalah mereka tidak dapat memanfaatkan tanah mereka untuk membuka usaha karena terhalang pipa. Sebagai kompensasi kepada masyarakat, PT A memberikan bantuan wirausaha pembuatan industri tahu beserta alat-alatnya. Ketika program pelatihan dilakukan oleh PT A, masyarakat hadir dan mengikuti pelatihan. Namun, setelah pelatihan selesai, tidak ada satu pun masyarakat yang dapat mengoperasikan sendiri pengolahan tahu tersebut. Kemacetan kegiatan ini karena masyarakat merasa tidak mampu dan malas membuat industri tahu seperti yang diajarkan

CSR PT A. Akhirnya alat tersebut tidak dioperasikan dan hanya disimpan di kantor desa. Atas pertimbangan dari perangkat desa, didatangkan orang Jawa yang diharapkan mampu memacu masyarakat untuk ikut bergabung kembali. Namun usaha ini mengalami kegagalan sehingga saat ini alat pembuat tahu justru dimanfaatkan oleh orang tersebut bukan masyarakat setempat.

“Kalau dari masyarakat sini kan, kita tawarkan waktu itu, ya pada umumnya mereka waktu itu kurang setuju. Makanya mereka dimasukkan ke perkebunan sawit saja daripada menganggur. Jadi kita taruh orang-orang yang sanggup mengelola pabrik tahu dengan modal sendiri, bahan baku, dan memasarkan sendiri, pokoknya desa itu mendapat bantuan Rp200.000,00 per bulan dari hasil penjualan, uang tersebut diserahkan ke ketua satu LKMD kemudian dibuat untuk pembangunan apalah, yang penting dia lapor ke desa. Sampai sekarang masih ada perundingan karena masyarakat kita sendiri pada dasarnya nggak mau (tidak suka kerja di pabrik tahu) lebih suka mengolah kebun sendiri” (warga Desa Tanjung Sawit).

Sebagian besar masyarakat lebih senang mendapatkan program fisik dibandingkan dengan program pelatihan. Perencanaan program yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat kebanyakan berupa proposal bantuan fisik. Pengajuan proposal ini dilakukan oleh masyarakat dengan persetujuan kepala desa dan camat. Selanjutnya camat membantu memfasilitasi pengajuan proposal tersebut ke PT A. Proses antara proposal diajukan hingga terealisasinya program cukup lama, bisa dalam waktu yang berbulan-bulan. Tidak jarang pula, bahkan masyarakat akan menagih kembali

jawaban dari proposal yang mereka ajukan ke PT A.

Ketika proposal program sudah disetujui oleh PT A, instansi kecamatan sudah tidak terkait lagi. Pada umumnya dana bantuan fisik langsung diberikan kepada masyarakat yang mengajukan.

Pada dasarnya dari masyarakat karena masyarakat pada umumnya kan, berswadaya. Pada saat akan membangun otomatis ada musyawarah karena dari hasil musyawarah dan swadaya itu kurang memadai, maka kita berkonsultasi dengan melakukan pendekatan ke PT A, setelah di diskusikan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa lalu diserahkan ke camat, maka bantuan dikirim kemari (Warga Desa Tanjung Sawit).

Dampak CSR Bagi Masyarakat

Keberhasilan suatu program, antara lain, dapat diketahui dari tingkat partisipasi masyarakat penerima, demikian juga dengan program CSR. Keberhasilan pembangunan atau program CSR tergantung pada keberhasilan membina masyarakat agar mampu memecahkan masalah yang dihadapinya, dalam hal ini partisipasi masyarakat sangat penting. Partisipasi berarti pelibatan diri secara penuh pada suatu tekad yang telah disepakati di dalam suatu kelompok, atau antarkelompok sampai dengan skala nasional dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata pembangunan di Indonesia. Mengacu pada pengertian partisipasi seperti di atas, partisipasi merupakan suatu proses menuntut keterlibatan penuh dari pelakunya dalam mengambil keputusan, menjalankan keputusan, dan

bertanggung jawab pada konsekuensi dari keputusan yang disepakatinya. Keterlibatan para pelaku ini tidak terbatas pada gagasan, tetapi juga tindakan yang terwujud yang mencakup seluruh kemungkinan kontribusi yang dapat diberikannya.

Dari partisipasi masyarakat tersebut dapat diketahui dampak yang diterima masyarakat itu sendiri. Dari kajian CSR dua perusahaan ini dapat dirinci adanya tiga hal dampak yang dirasakan oleh masyarakat penerima program. *Pertama*, berdampak pada pemberdayaan yang selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; *kedua*, dampak tumpang-tindih dengan program lain. Dampak CSR yang berhubungan langsung dengan pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terlihat pada program PT B yang berupa pelatihan Program Pertanian Terpadu.

Sementara itu, dampak CSR yang muncul justru konflik terlihat pada program penanaman pisang. Program ini masih bersifat dari atas ke bawah karena ide penanaman pohon pisang tidak murni berasal dari masyarakat setempat, tetapi dari perusahaan. Ada masyarakat yang dengan kesadaran penuh menanam pohon pisang, tetapi ada masyarakat tertentu yang mau menanam pisang karena menginginkan mendapat keuntungan tertentu. Dampak dari program ini justru berupa konflik karena ketika masyarakat sudah bersedia menanam pohon pisang dan sudah berbuah, perusahaan tidak membantu pemasaran hasilnya. Waktu penanaman yang bersamaan antarrumah tangga mengakibatkan waktu panen juga bersamaan, sementara masyarakat tidak mampu memasarkan karena tidak mempunyai jaringan pemasaran dan mahal biaya

transportasi dari rumah penduduk menuju pasar. Akibatnya, muncul konflik karena banyak pisang ditimbun hingga membusuk dan akhirnya tidak dapat lagi dijual.

Dampak berikutnya adalah tidak adanya keberlanjutan program. Keadaan ini dapat terjadi pada program yang sifatnya karitatif. Program yang sifatnya karitatif kebanyakan berasal dari program PT A, yang kebanyakan berupa pembangunan fisik gedung sekolah, gapura, tugu, dan sebagainya. Program pemberdayaan dari PT A yang berupa industri rumah tangga pembuatan tahu juga tidak ada keberlanjutannya karena kurangnya pemberdayaan kepada masyarakat. Bahkan peralatan pembuatan tahu justru dijual kemudian diteruskan orang lain yang bukan penerima program dan ternyata usaha itu dapat berkembang dan sukses.

Dampak yang lain adalah adanya kegiatan yang tumpang-tindih antara program pertanian PT B dengan program dari Dinas Pertanian kabupaten tersebut. Tidak adanya komunikasi antara perusahaan dan pemerintah mengenai bentuk-bentuk program CSR di wilayah tertentu menyebabkan program yang sudah dilaksanakan perusahaan dilaksanakan juga oleh Dinas Pertanian setempat.

Penilaian Stakeholder terhadap Program CSR PT A dan B

Pendapat aktifis LSM mengenai CSR dari dua perusahaan ini adalah keduanya masih jauh dari pemberdayaan masyarakat. Pola program kebanyakan masih bersifat dari atas ke bawah sehingga kurang partisipatif. Pelaksanaan program akhirnya masih mementingkan kepentingan perusahaan daripada ke arah pemberdayaan masyarakat.

Menurut aktifis LSM, CSR dari dua perusahaan ini masih jauh dari ide untuk pemberdayaan masyarakat. Namun sebenarnya sebelum program dimulai ada beberapa perusahaan mengatakan sudah menggunakan metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*).

Berikut ungkapan salah seorang aktifis:

"[Pemberian program apa yang akan diberikan kepada masyarakat] Didominasi oleh PT B, ini polanya saja, tapi prosesnya mungkin sudah tepat, cuma cara yang dilakukannya yang salah, yaitu mulai mengarah-arahkan ke sesuatu yang akan mereka berikan ke masyarakat. Ini menurut penglihatan saya dan kita banyak diskusi untuk hal-hal begitu, dan mereka lebih serius daripada PT A. PT A tidak ada bagian sendiri untuk CSR sampai sekarang" (LSM Riau).

Pelaksanaan program CSR PT A masih didominasi program yang bersifat karitatif, sementara kebanyakan program dilaksanakan setelah ada tuntutan dari masyarakat. Sebagian besar tuntutan berasal dari masyarakat yang terkena dampak dari beroperasinya perusahaan. Tidak mengherankan jika beberapa program dilakukan setelah ada tuntutan dari masyarakat, seperti diungkapkan informan R berikut ini.

*"Modelnya PT A selama ini kalau tiba-tiba masyarakat marah ada demonstrasi segala macam, misalnya minta sekolah, maka PT A akan mendirikan sekolah. Jadi programnya hanya bersifat memandatkan sesaat tidak membuat CD (*community development*) kalau kita memikirkan bagaimana CD bisa ada keberlanjutan ke depan. Kalau mereka cenderung nanti*

kalau masyarakat minta jalan ya diberi jalan, minta mesin ya dikasih mesin begitu, tetapi tidak membangun prosesnya dengan tepat” (LSM Riau 2003).

Menurut LSM ini, pelaksanaan CSR PT B jauh lebih bagus dibandingkan dengan PT A seperti terungkap dalam hasil wawancara berikut ini.

“Dalam keseriusan PT A jauh tertinggal dari B. Keseriusan bisa dinilai dari dibentuk atau tidaknya departemen untuk menangani CD nya. Masa untuk menangani CD yang sedemikian besar dananya dilakukan sambil main-main, hanya nempel di devisi lain, itu memperlihatkan ketidakseriusan mereka, tapi ini masih mendinglah dibandingkan dengan PT IA” (LSM Riau, 2003).

Staf di beberapa kantor pemerintah daerah setempat menegaskan perusahaan tidak pernah berkoordinasi dengan pemerintah daerah saat melaksanakan CSR. Koordinasi biasanya hanya pada level pemerintah desa dan kecamatan ketika proposal kegiatan CSR tersebut akan diajukan. Dalam koordinasi tersebut, pemerintah desa dan kecamatan hanya sekedar mengetahui saja jika ada usulan dari masyarakat untuk program tertentu. Selanjutnya setelah program diterima atau ditolak, pemerintah desa dan kecamatan tidak mengetahuinya lagi karena tidak ada laporan. Hal ini menyulitkan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan program tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkadang ketika ada kegagalan program, ada masyarakat yang mengadu ke pemerintah desa atau kecamatan, tetapi karena tidak adanya koordinasi sejak awal, sulit untuk memecahkan persoalan yang ada.

Selain itu, terdapat kasus yang terjadi di sebuah kabupaten di provinsi ini, yaitu adanya program yang tumpang-tindih antara program dari perusahaan dengan program dari Dinas Pertanian setempat. CSR perusahaan B banyak bergerak di bidang pertanian, yaitu dengan program pertanian terpadu. Untuk mendukung program mereka, perusahaan menempatkan seorang fasilitator atau penyuluh pertanian. Demikian juga Dinas Pertanian yang menempatkan petugas penyuluh lapangan. Selain sama-sama menempatkan tenaga penyuluh lapangan, ternyata lokasi dan jenis program yang dijalankan sama persis antara program dari Dinas Pertanian dan CSR perusahaan. Hal ini tidak terjadi jika perusahaan melakukan koordinasi dengan dinas setempat sehingga pemerataan program dapat dirasakan semua warga masyarakat.

Program pertanian dari Dinas Pertanian setempat lebih ditekankan pada aspek pemerataan bagi desa- desa di wilayah kerja mereka dan pertimbangan layak tidaknya suatu desa menerima program tersebut. Dengan demikian, diharapkan program tidak terakumulasi hanya pada wilayah tertentu. Hal itu untuk menghindari terjadinya berkembangnya banyak program di satu wilayah, sementara di wilayah yang lain tidak ada program sama sekali padahal wilayah tersebut sangat membutuhkan kehadiran program tertentu. Hal ini yang menjadi dasar bagi Dinas Pertanian untuk menentukan lokasi program akan diadakan. Jika terdapat koordinasi yang baik antara PT B dengan Dinas Pertanian, maka tumpang-tindih lokasi program tersebut dapat dihindari dan program tidak terakumulasi di lokasi yang sama.

Meskipun koordinasi dalam pembuatan program tidak ada antara Dinas Pertanian setempat dengan PT B, perusahaan tersebut tetap membutuhkan bantuan dari dinas terkait, terutama dalam kegiatan pelatihan pertanian. Oleh karena PT B banyak menekankan pada pengembangan pertanian terpadu, PPMR PT B membutuhkan bantuan dari Dinas Pertanian untuk menjadi instruktur pada pelatihan petani di Balai Diklat Pertanian yang didirikan PT B. Diklat untuk para petani dilakukan sebulan dua kali dengan peserta para petani desa binaan PT B secara bergiliran. Dinas Pertanian benar-benar tidak terkait dengan pelaksanaan program CSR di lapangan.

Semua bersumber dari tidak adanya koordinasi sehingga wajar jika pemerintah daerah tidak mengetahui di wilayah kerja mereka terdapat program CSR dari perusahaan. Bahkan pemerintah daerah baru mengetahui setelah ada pengaduan dari masyarakat atau adanya kegagalan program. Dengan demikian, pemerintah daerah akan kesulitan mencari jalan keluarnya. Misalnya adalah pada kasus kesulitan pemasaran pada panen pisang. Program CSR berupa bantuan bibit pisang bagi semua keluarga di sebuah kecamatan berhasil membuat semua keluarga di lokasi tersebut menanam pisang. Namun ketika semua pohon pisang berbuah, tidak ada bantuan dari PT B untuk memasarkan komoditas tersebut sehingga banyak pisang yang dibiarkan membusuk. Selain itu, pemilihan bibit tanaman tidak melalui konsultasi dengan Dinas Pertanian, tetapi hanya mengundang dinas untuk diekspos ketika panen perdana. Utamanya pada panen pisang yang ketiga, buah pisang yang dihasilkan tidak sehat karena kesalahan dalam pemilihan bibit yang didatangkan dari luar daerah. Jika ada

koordinasi dengan Dinas Pertanian, hal tersebut dapat dihindari karena Dinas Pertanian cukup mengetahui kalau bibit pisang dari luar daerah tersebut kurang bagus kualitasnya sehingga membuat hasil panen tidak maksimal.

“Pemilihan bibit tanaman tidak ada konsultasi cuma jika panen perdana dinas baru diundang dan diekspos. Gaungnya dua kali panen pisang, dua kali panen karet [tanaman pisang ditanam di sela-sela tanaman karet]. Untuk panen yang ketiga, pisangnya kurus-kurus karena tanaman sela akan kalah dalam mendapatkan unsur hara” (informan Dinas Pertanian Kab. Pelalawan).

Masyarakat pernah mengadu mengenai kesulitan pemasaran pisang di wilayah binaan PT B kepada DPRD setempat. Tanggapan dari DPRD adalah dengan melakukan peninjauan lapangan bersamaan ketika anggota komisi turun ke masyarakat di wilayah tersebut dengan agenda peninjauan program pembangunan. Namun dewan belum dapat mencari jalan keluarnya karena masyarakat sendiri sudah pasrah dengan kondisi mereka.

“Beberapa perusahaan dalam CSR-nya berjud pemberdayaan masyarakat, tetapi beberapa perusahaan yang lain masih mendahulukan aspek politis program demi keamanan perusahaan selanjutnya baru pemberdayaan” (informan DPRD).

Ada perbedaan penilaian *stakeholder* di dua kabupaten yang berbeda dan program yang berbeda terhadap CSR PT A. Dalam bidang pendidikan CSR PT A oleh Dinas Pendidikan dinilai cukup berhasil di wilayah kerja mereka. Diakui oleh dinas, kebanyakan program PT A berupa pembangunan fisik

gedung sekolah. Program ini diutamakan bagi sekolah yang terkena jalur pipa minyak, baik yang ada di tengah kota maupun yang berada di perdesaan yang terpencil. Sebagai contoh, SD 034 KR yang berlokasi di sepanjang perkebunan sawit dan dilintasi pipa-pipa minyak jauh di perdesaan yang terpencil berhasil mendapatkan program CSR PT A dalam bentuk pembangunan gedung sekolah. Padahal sebelumnya sekolah dengan 350 murid ini hanya menumpang di SD lain dengan cara masuk siang. Sebelum program dimulai sekolah membuat proposal yang diserahkan ke Cabang Dinas Pendidikan setempat. Selanjutnya dari cabang dinas diserahkan ke Dinas Pendidikan kabupaten yang kemudian oleh Dinas Pendidikan akan diserahkan pada PT A. Selama ini koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan PT A cukup bagus.

“Sebelumnya itu kami adakan semacam, ya ada informasi dari sana, ya kalau perlu dibuat proposal itulah. Proposal. Memang umumnya di sini kan membantu setiap sekolah-sekolah itu, apa itu ya, apalagi kita kan, lokasi desa ini ada termasuk wilayah PT A ini. Sekitar satu tahun tu, bantuan turun” (informan SDN KR).

Kebanyakan program PT A bersifat pembangunan fisik dan hanya sedikit yang mengarah pada program pemberdayaan. Diakui Kepala Bapedalda Kabupaten B bahwa publikasi program CSR PT A cukup besar, tetapi belum tentu sebesar keberhasilan programnya. Perusahaan banyak melaksanakan program fisik yang selalu dapat dilihat secara langsung. Sudah ada pelaksanaan CSR yang muncul setelah ada konflik dalam masyarakat sekitar perusahaan karena adanya pencemaran. Timbul kesan dari

masyarakat bahwa CSR dilakukan hanya sekedar untuk meredam emosi masyarakat.

Penilaian staf Bapeda kabupaten ini mengenai CSR PT A hampir sama dengan pendapat informan yang lain, yaitu tidak adanya koordinasi dengan pemerintah daerah sehingga mengakibatkan ada program yang tumpang-tindih. Misalnya dalam rencana renovasi gedung sekolah yang sudah dianggarkan dalam APBD ternyata program CSR PT A juga melakukan program renovasi gedung sekolah di sekolah yang sama. Jalan keluar yang ditempuh adalah akhirnya PT A tetap melakukan renovasi gedung sekolah tersebut, sementara pemerintah daerah membatalkan renovasi gedung sekolah tersebut dalam revisi APBD.

Sementara itu, di Kota D terjadi kasus yang sama, yaitu tidak ada koordinasi sehingga Bapeda harus aktif mencari informasi ke PT A mengenai CSR. Sebelumnya memang pernah ada koordinasi pada waktu program direncanakan, tetapi ketika program sudah berjalan dan program-program yang lain menyusul pada realitanya tidak ada koordinasi. Dengan demikian, kalangan pemerintah daerah kesulitan menilai apakah CSR PT A sudah berhasil memberdayakan masyarakat atau belum melalui program mereka.

“Tetapi saya mengingatkan perusahaan besar ini kadang-kadang kiprahnya ke pusat saja, tidak ada koordinasinya ke daerah, terutama masalah pencemaran itu, sehingga koordinasi kita dengan perusahaan ini kadang-kadang tak nyambung. Kadang kita surati mereka ya, tapi mereka tidak jawab e ... karena mereka mengatakan mereka perusahaan besar jadi mereka lingkupnya di pusat di Jakarta.

Sehingga daerah ini hanya menerima ini aja, menerima e ... apa adanya aja ya, kita selalu kadang kadang merangkul mereka supaya sama sama kita menerima suatu pencemaran. Tapi kadang-kadang jawaban mereka itu tunggu tetunggu aja ya atau e ... ya bisa kita coba Pak, mengatakan keluhan mereka" (informan Bapedalda Dumai).

Pada saat pengumpulan data ini dilakukan, yaitu pada akhir tahun 2003 dan awal tahun 2004, PT B lebih serius melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui program CSR mereka dibandingkan dengan PT A. Hal itu diakui oleh banyak informan dan ternyata penilaian ini berlanjut hingga data terakhir tahun 2006. Dalam sebuah berita yang dimuat di *Riau Online* Rabu, 26 April 2006, ditulis di awal tahun 2006 PT B yang beroperasi di Riau kembali mengukir prestasi di bidang sosial, khususnya pemberdayaan masyarakat. Perusahaan ini kembali menjadi nominator dalam Anugerah CSR *Award* Indonesia yang diprakarsai oleh Departemen Sosial dan Kementrian Koordinator Kesra pada Kamis, 24 April 2006 di Jakarta. Rudi Fajar wakil dari PT B mengatakan sebagai berikut.

"Berbagai penghargaan tentang CSR yang diterima PT B sebenarnya bukanlah tujuan melainkan buah dari apa yang sudah dilakukan secara sungguh-sungguh selama ini. Sebelumnya B pernah meraih prestasi berupa *runner up* CSR *Award* tingkat Asia bidang *Environmental Excellent* dan pemenang pertama CSR *Award* Indonesia bidang sosial. Bagi B pelaksanaan dan implementasi CSR yang dilakukan selama ini merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Hal ini sejalan dengan visi B menjadi perusahaan berskala dunia dan

tuntutan *sustainability business* yang harus memperhatikan 3 P (*People, Planet* dan *Profit*)" (*Riau Online*, Rabu, 26 April 2006).

Penutup

Perbedaan antara model pelaksanaan CSR PT B dengan CSR yang dilaksanakan oleh PT A dapat diketahui dari keseriusan masing-masing perusahaan. Keseriusan PT B terlihat pada penempatan kegiatan CSR pada departemen tersendiri, yaitu Departemen Pemberdayaan Masyarakat Riau, sehingga PT B lebih responsif dalam mengakomodasi permasalahan CSR bagi masyarakat sekitar dan pemberdayaan masyarakat dapat lebih dipantau. Berbeda dengan PT A yang termasuk perusahaan tua dengan lokasi perusahaan tersebar di 7 kabupaten/kota se-Provinsi Riau yang menempatkan koordinasi program CSR hanya di bawah manajer *public Affairs*.

Perbedaan ini akan berpengaruh pada program yang dilakukan. PT B lebih memfokuskan pada pengembangan agribisnis berbasis komoditi unggulan, pendidikan dan latihan sumber daya manusia, industri kecil, dan perintisan program kehutanan dengan petugas penyuluh lapangan yang ditempatkan di wilayah binaan mereka. Penempatan petugas penyuluh lapangan ini akan mendekatkan hubungan antara masyarakat wilayah binaan dengan perusahaan sehingga jika terjadi permasalahan di lapangan dapat segera direspons.

Ditinjau dari jenis program terlihat perbedaan yang signifikan. Program PT B kebanyakan lebih bersifat pemberdayaan sumber daya manusia dibandingkan dengan jenis program yang bersifat karitatif. Sementara itu, PT A lebih mengutamakan program yang bersifat karitatif dan fisik. Meskipun

kebanyakan program PT A bersifat karitatif dan fisik, masih ada usaha untuk melakukan program yang bersifat pemberdayaan, khususnya industri kecil. Namun dari beberapa kecamatan di beberapa kabupaten yang diobservasi program pemberdayaan tersebut kurang berkelanjutan.

Terdapat persamaan pemberian program dari kedua perusahaan ini, yaitu sama-sama belum mengedepankan aspek partisipatif, melainkan program lebih diberikan secara dari atas ke bawah, terutama pada program pemberdayaan. Program-program yang dilakukan berdasarkan usulan dari masyarakat hanya program yang bersifat fisik dari PT A. Khusus PT B ketika akan memulai program sudah melakukan kegiatan PRA (*Participation Research Action*), hal ini dinilai sudah lumayan bagus, tetapi aplikasi program kepentingan perusahaan tetap dinomorsatukan dibandingkan dengan pemberdayaan masyarakat. Mengenai keberadaan program CSR, menurut pandangan *stakeholder*, kebanyakan CSR PT B dibentuk sebelum ada problem dengan masyarakat. Sementara itu, CSR PT A sebagian besar dibentuk sebelum ada problem dengan masyarakat sekitar, tetapi memang ada sebagian kecil program dibentuk dan dilakukan setelah terdapat problem dengan masyarakat sekitar.

Peran program CSR dalam pemberdayaan masyarakat sekitar dan keberlanjutan program lebih terasa untuk program-program yang dikembangkan oleh PT B. Pemberdayaan pada masyarakat lebih terasa pada model program-program yang bersifat dari bawah ke atas. Program yang bersifat dari bawah ke atas yang bersumber dari masyarakat dikembangkan melalui saluran FGD dan PRA akan

menghasilkan partisipasi masyarakat. Jika partisipasi masyarakat sudah bagus, maka keberlanjutan akan terlihat.

Perusahaan yang menjalankan program CSR dapat dikategorikan bahwa *pertama*, perusahaan yang menjadikan masyarakat hanya sebagai objek. Perusahaan yang seperti ini dalam realisasi programnya banyak yang bersifat kosmetik sehingga implikasi program hanya berupa program-program yang berbentuk karitatif. *Kedua*, perusahaan yang dalam realisasi programnya menjadikan masyarakat sebagai subjek. Realisasi program berupa pemberdayaan masyarakat, meminimalisasi konflik dengan implikasi program pemberdayaan dan pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, besar kecilnya dana yang dialokasikan perusahaan untuk program CSR tidak berkorelasi dengan implikasi program CSR, apakah CSR sudah merealisasikan pemberdayaan masyarakat dan berkelanjutan atau hanya sekedar karitatif. Salah satu hal yang menentukan program CSR dapat merealisasikan pemberdayaan adalah perusahaan yang menempatkan CSR pada divisi tersendiri dan bukan di bawah divisi lain.

Dari pandangan *stakeholder* dapat disimpulkan hampir sebagian besar *stakeholder* menilai CSR kedua perusahaan tersebut tidak membangun koordinasi yang terus-menerus dengan pemerintah daerah. Jika terdapat koordinasi, itu hanya bersifat parsial dan hanya pemberitahuan usulan program pada tingkat pemerintah desa dan kecamatan. Hal ini mengakibatkan beberapa program CSR tumpang-tindih dengan program pemerintah daerah, baik dari lokasi program dilaksanakan maupun jenis program yang dipilih.

Daftar Pustaka

- Harahap, Oky Syeiful R. 2006. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, www.republika.co.id.
- Inspirit Innovation Circles dan Acces. 2004. hand out *Training Fasilitasi Pemberdayaan*, Masyarakat, 21-26 Juni.
- "Komitmen PT Riau Andalan Pulp & Paper dengan konsep sustainability business yang memadukan prinsip 3P. 2006. Riau Online, 26 April, www.riau.go.id.
- Mubyarto. 1984. "Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan" dalam *Strategi Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan, Universitas Gadjah Mada.
- Nurhadi, Toeti Heraty. 1985. "Persepsi kebudayaan: utopia dan realita", dalam Alfian (ed.), *Persepsi Masyarakat tentang Kebudayaan*. Jakarta: Gramedia, hlm. 208.
- Sukamdi, Faturochman, Mulyadi, Wini Tamtari, Bambang Wicaksono, Henny Ekawati, Suparjan, Amelia Maika, Danang Arif Darmawan, dan Nurhadi. 2003. *Study on Corporate Social Responsibilities: to Support Design fo the main Phase Capacity 2015 Program*. PSKK UGM dan UNDP. Laporan Penelitian.
- Rogers, M. Everett dan F. Floyd Shoeder. 1981. *Memasyarakatkan Ide-ide Baru*. Disarikan oleh Hanafi (ed.). Surabaya: Usaha Nasional.
- Rudito, Bambang, Arif Budimanto, Adi Prasetijo. 2004. *Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*. Jakarta: ICSD (Indonesia Center for Sustainable Development).
- Sumarto, Mulyadi. 2007. "CSR layaknya buah simalakarna", *Kompas*, 15 Agustus.
- . 2007. "Perlu standarisasi pelaksanaan CSR", *Republika*, 25 September.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*. Jakarta: Gramedia.